Jl. Kalibata Timur IVD No. 6 Pasar Minggu
Jakarta Selatan - Indonesia 12740
Tel : +6221 7901885 / +6221 7994015
+6221 70792112
Fax : +6221 7994005
Email : icw@antikorupsi.org
website : antikorupsi.org

Indonesia Corruption Watch

laporan tahunan 2011

BERSAMA RAKYAT MEMBERANTAS KORUPSI

FOTO: dok. ICW

Indonesia Corruption Watch (ICW) saat ini menjadi salah satu lembaga independen paling lantang bersuara dalam gerakan antikorupsi. Eksistensi ICW dalam pemberantasan korupsi sejak tahun 1998 telah diakui publik. Secara berturut-turut, tahun ini ICW mendapat penghargaan UII Award dari Universitas Islam Indonesia, Soegeng Sarjadi Syndicate Award, dan penghargaan dari Dewan Pers.

Selain award dari sejumlah institusi, ICW juga mendapat penghargaan yang jauh lebih bernilai, yakni dukungan dari masyarakat luas. Sejak membuka Divisi Kampanye Publik dan Penggalangan Dana pada 2010 lalu, ICW telah berhasil mengumpulkan dukungan nyata berupa barisan supporter ICW yang kini berjumlah hampir seribu orang. Para supporter ini secara rutin memberikan donasi untuk mendukung kerja-kerja pemberantasan korupsi.

Korupsi yang sudah sedemikian menggurita di Indonesia memang harus dilawan secara bersama-sama. Bersama masyarakat, ICW berupaya meningkatkan kapasitas publik untuk menuntut haknya mendapatkan fasilitas dasar yang dijamin oleh negara tanpa dikorupsi. Kontrol masyarakat yang kuat sangat diperlukan untuk membuat perubahan. ICW juga berupaya mendobrak kebuntuan hukum untuk lebih dapat diandalkan dalam upaya pemberantasan korupsi.

DAFTAR ISI

Pengantar..... 3

Ketua Dewan Etik.....3

Koordinator ICW.....6

Visi dan Misi ICW..... 9 - 10

Divisi Kampanye Publik dan Penggalangan Dana.....11

Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran.....14

Divisi Korupsi Politik.....19

Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan..... 22

Divisi Investigasi dan Publikasi..... 25

Divisi Monitoring dan Pelayanan Publik.....27

Features.....29

Audit Keuangan.....31

Sumber Daya Manusia ICW.....33

Penghargaan ICW..... 34

Teman Kami Semakin Banyak

Dadang Trisasongko
Ketua Dewan Etik

Pada akhir tahun 2011, Badan Pekerja ICW melaporkan bahwa, sekalipun program penggalangan dana publik belum genap dua tahun berjalan, jumlah warga masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai pendukung ICW hampir mencapai seribu orang. Setiap keputusan untuk bergabung ke dalam barisan pendukung ICW selalu menggetarkan hati, karena setiap sen sumbangan yang masuk ke rekening ICW adalah ekspresi sebuah kesadaran politik yang demikian mengagumkan. Sikap politik untuk tidak mau tunduk pada sistem pemerintahan yang korup.

Bangkitnya kesadaran politik warga ini ibarat arus deras air pegunungan yang selalu menawarkan harapan bagi masa depan bangsa Indonesia. Arus kesadaran mereka terasa berlawanan arah dengan arus utama yang biasa kita saksikan di dunia politik dan birokrasi. Mereka yang duduk di birokrasi dan para politisi itu alih-alih menyumbangkan tenaga, pikiran dan hartanya untuk memberantas korupsi, sebagian politisi dan birokrat kita justru berperilaku seperti drakula dan parasit. Menghisap darah rakyat, menggerogoti pilar-pilar demokrasi dan menyebarluaskan sikap hidup yang merusak pola pikir masyarakat.

Dibandingkan masifnya praktik korupsi, angka seribu mungkin terlalu kecil. Tetapi, saya tetap optimis bahwa arus balik kesadaran sekelompok warga ini, sedikit demi sedikit, akan terus membesar dan menyebar. Entah mereka akan mengalir bersama organisasi seperti ICW atau bahkan mampu mengalir deras sendiri bersama aliran-aliran lain yang sama. Mereka kelak akan menjadi kontrol sosial yang dahsyat yang mampu mengimbangi politik parlementarian yang nyaris mengalami kebangkrutan moral.

Pertanyaannya kemudian adalah: peran apa yang bisa dimainkan oleh organisasi-organisasi seperti ICW dan organisasi masyarakat sipil lain?

Ini adalah tantangan organisasi masyarakat sipil di Indonesia, khususnya ICW yang selama ini dianggap sebagai salah satu organisasi pionir yang mendorong bangkitnya gerakan sosial anti korupsi di Indonesia. Untuk itu, ICW telah memulai satu langkah yang sangat strategis dalam pembangunan gerakan sosial anti korupsi melalui pendekatan penggalangan sumber daya sebagai pintu masuknya. Dari sudut pandang penggalangan sumber daya, penggalangan donasi dari masyarakat untuk ICW adalah salah satu saja dari modus dalam pembangunan gerakan sosial anti korupsi di Indonesia.

Setiap sumbangan dana masyarakat kepada usaha masyarakat sipil dalam pemberantasan korupsi selalu merepresentasikan sikap politik penyumbangnya terhadap problem korupsi di Indonesia. Bagi ICW, jumlah pendukung yang besar memang tidak dilihat sekedar dari implikasi finansialnya, tetapi lebih jauh dari itu adalah bagaimana menangkap makna politik di balik angka-angka itu. Oleh karena itu, seluruh respons kelembagaan ICW juga harus disesuaikan dengan strategi kapitalisasi makna politik di balik kegiatan penggalangan dana publik ini.

Untuk kepentingan keberlanjutan dan pengembangan gerakan sosial anti korupsi, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu :

Pertama, ICW perlu memainkan peran untuk mendorong terjadinya multiplier effect dari dukungan yang telah diberikan sejumlah anggota masyarakat kepada ICW. Strategi ini bisa dilakukan melalui berbagai pendekatan, misalnya penggunaan dana sumbangan untuk mendukung kegiatan pendidikan, kampanye publik dan penguatan jejaring masyarakat. Saya pikir peran ini sudah mulai dilakukan oleh ICW di tahun 2011 ini dengan menyelenggarakan sejumlah pelatihan antikorupsi kepada masyarakat dengan menggunakan dana dukungan masyarakat.

Kedua, meningkatkan peran ICW sebagai framing actor dalam merespons begitu banyaknya informasi yang beredar di publik terkait masalah korupsi di Indonesia. Peran ini sangat diperlukan agar isu-isu korupsi dan pemberantasannya tidak elitis dan menjadi bagian dari kesadaran kolektif masyarakat dan mampu memotivasi mereka untuk mengambil bagian dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Ketiga, ICW perlu memperluas ruang-ruang partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi. Dalam kerangka program, perlu disediakan outlet-outlet yang beragam agar publik bisa lebih banyak terlibat sesuai dengan minat dan kesanggupan masing-masing individu.

Keempat, ICW perlu merawat gerakan dan momentum perubahan yang telah terbangun dengan mulai membangun identitas kolektif yang lebih mampu merangkul banyak lagi anggota masyarakat. Dalam pembangunan gerakan sosial, pengembangan formasi identitas ini sangat menentukan berkembangnya gerakan sosial.

Kelima, dalam jangka panjang, peran mendorong menguatnya gerakan sosial anti korupsi harus dimainkan oleh banyak aktor lain, terutama di daerah. Oleh karena itu, ICW perlu memfasilitasi kawan-kawan organisasi masyarakat sipil di daerah untuk ikut mendorong menguatnya gerakan sosial antikorupsi di daerah.

Di akhir catatan pengantar ini, saya selaku Ketua Dewan Etik ICW, mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semua pendukung ICW yang telah memutuskan untuk menjadi bagian dari gerakan sosial untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih di Indonesia.

Ucapan terima kasih dan apresiasi juga saya sampaikan kepada semua anggota Badan Pekerja ICW yang dengan penuh dedikasi telah mempersembahkan ketangguhan, kecerdasan dan keberaniannya untuk terus memperluas perlawanan terhadap korupsi.

Membangun Kesadaran, Membangkitkan Perlawanan terhadap Korupsi

FOTO: dok. ICW

J. Danang Widoyoko
Koordinator Badan Pekerja

Salah satu program ICW yang didanai oleh masyarakat adalah pencegahan korupsi di sekolah. Seperti korupsi dalam pelayanan publik lainnya, korupsi di sekolah dilakukan dalam bentuk berbagai macam pungutan. Bagi kelas menengah, nilai pungutan itu mungkin tidak seberapa. Akan tetapi bagi sebagian besar penduduk Indonesia, pungutan di sekolah sangat memberatkan.

Berbeda dengan kasus korupsi besar, seperti kasus korupsi Nazarudin yang menjadi "sekadar"tontonan seru, kasus korupsi seperti di sekolah justru sangat riil dan menimbulkan korban. Korbannya adalah orang tua murid yang harus membayar lebih mahal untuk pelayanan yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara.

Dalam kasus korupsi besar seperti kasus yang melibatkan Angelina Sondakh, penanganannya menjadi drama yang menegangkan. Siapa saja pihak lain yang terlibat menjadi misteri sampai proses pengadilan dilakukan, ketika semua data dan bukti dibuka. Tidak mengherankan bila kemudian kasus korupsi besar selalu menarik perhatian media massa dan menjadi tontonan yang tidak kalah dibandingkan dengan sinetron. Sebaliknya, kasus korupsi kecil-kecilan yang melibatkan orang-orang kecil cenderung jauh dari perhatian publik. Padahal, kasus korupsi kecil mengambil langsung uang dari kantong rakyat, berbeda dengan kasus korupsi besar yang dampak kerugiannya tidak dirasakan langsung oleh masyarakat.

Karena nilainya yang kecil, aparat penegak hukum sering enggan menangani kasus korupsi di sekolah. Oleh karena itu, strategi yang dipergunakan oleh ICW berbeda dengan strategi pembongkaran kasus. Untuk memberantas korupsi di sekolah, ICW memilih strategi dengan memperkuat posisi tawar orang tua murid dan guru.

Sebetulnya sudah ada infrastruktur bagi demokrasi dan partisipasi di sekolah. Keberadaan Komite Sekolah yang berwenang menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) serta kurikulum membuat orang tua dan guru sesungguhnya memiliki kesempatan untuk melakukan perubahan. Hanya saja, selama ini Komite Sekolah didominasi oleh Kepala Sekolah. Akibatnya, Komite Sekolah justru menjadi stempel Kepala Sekolah, termasuk melegalisasi berbagai macam pungutan.

Meskipun sudah menyediakan instrumen demokrasi, sekolah di sisi lain masih menjadi kepanjangan tangan birokrasi pendidikan. Pemilihan Kepala Sekolah masih menjadi kewenangan Dinas Pendidikan. Komite Sekolah tidak memiliki kewenangan untuk memilih atau mengganti Kepala Sekolah. Akibatnya, akuntabilitas Kepala Sekolah lebih ke Dinas Pendidikan daripada ke Komite Sekolah atau orang tua murid. Kondisi yang kemudian membuat Kepala Sekolah mendominasi pengambilan keputusan di dalam Komite Sekolah. Pada banyak kasus, ketika Komite Sekolah mulai bersikap kritis terhadap kebijakan Kepala Sekolah, ia akan cenderung dilemahkan dan pengurusnya diganti oleh orang tua murid yang dekat dengan Kepala Sekolah.

Pada saat yang sama, partisipasi dan demokrasi juga membutuhkan prasyarat lain: informasi yang memadai. Agar dapat berpartisipasi dan mewujudkan demokrasi, maka Komite Sekolah juga harus memiliki cukup informasi dan pengetahuan. Tanpa itu, posisi tawar Komite tidak akan berada pada level yang sama dengan Kepala Sekolah. Situasi ini yang kemudian akan membuat Kepala Sekolah cenderung dominan dan lebih menentukan dalam pengambilan kebijakan di sekolah.

Dengan kondisi seperti di atas, maka ICW perlu menyesuaikan strategi pemberantasan korupsi. Strategi dengan mendorong penegakan hukum tidak cukup efektif untuk memerangi korupsi kecil-kecilan di sekolah dan kantor pelayanan publik lainnya.

ICW - Bersama Rakyat Memberantas Korupsi

Strategi yang dilakukan ICW adalah dengan memperkuat orang tua murid. Ketika orang tua murid berdaya dan mampu melawan praktik korupsi, maka korupsi akan bisa ditekan. Salah satu pemberdayaan yang dilakukan adalah dengan memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuan melalui pelatihan. Bila orang tua dan guru memiliki informasi yang sama dan mendapatkan pengetahuan yang memadai tentang pendidikan, maka berbagai pungutan di sekolah akan bisa ditekan. Selama ini proses dialog dan komunikasi di dalam Komite Sekolah terdistorsi karena perbedaan level pengetahuan antara Kepala Sekolah dengan anggota Komite Sekolah.

Selain itu, ICW juga akan melakukan pendampingan terus-menerus sehingga anggota Komite Sekolah, guru dan orangtua siswa bisa terus mendapatkan informasi dan memiliki jaringan yang bisa memberikan dukungan kepada mereka. Pelatihan ini masuk dalam program penyusunan APBS secara partisipatif, yang didanai sepenuhnya oleh dana donasi yang dikumpulkan ICW dari masyarakat.

Program ini sudah dan akan terus dilakukan oleh ICW di Tangerang dan Garut. Di Tangerang, ICW bekerjasama dengan Serikat Guru Tangerang (SGT) dan di Garut bekerjasama dengan Garut Governance Watch (GGW). Dua organisasi ini telah bekerjasama dengan ICW sejak tahun 2003 dalam berbagai penelitian dan pendampingan masyarakat untuk melawan korupsi.

Di Garut, ada 28 sekolah yang didampingi dalam program APBS Partisipatif. Sementara di Tangerang, ICW melakukan pelatihan guru kritis di 15 kecamatan. Dengan demikian, dari program ini akan ada ribuan orang yang- mendapatkan manfaat dari pemberantasan korupsi.

Dalam perjalanan program, rekan-rekan di GGW ternyata mampu mengembangkan program. Bukan lagi pelayanan publik di sekolah, tetapi berbagai pelayanan publik yang lainnya juga turut diawasi. Rekan-rekan GGW membentuk Forum Warga yang akan memberikan bantuan bagi masyarakat yang mendapatkan masalah dalam pelayanan publik. Aktivis Forum Warga ini yang akan terus mendampingi dan memberikan pendidikan kepada masyarakat untuk melawan praktik korupsi dalam pelayanan publik.

Selain itu, ICW juga melakukan pendidikan antikorupsi secara intensif terutama ke kampus-kampus. Dukungan dari para Supporter ICW membuat ICW mampu mengirim staf untuk memberikan pendidikan antikorupsi, berupa ceramah, pelatihan atau aksi bersama dengan para mahasiswa. Selain itu, pendidikan antikorupsi juga disampaikan dengan bahasa dan media yang populer seperti musik. Tujuan akhir dari semua program dan kampanye adalah membangun kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka serta perlunya melakukan perlawanan terhadap praktik korupsi yang merugikan kita semua.

Visi

Menguatnya posisi tawar rakyat yang terorganisir dalam mengontrol negara dan turut serta dalam pengambilan keputusan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, bebas korupsi, berkeadilan ekonomi, sosial dan jender.

Misi

Mengintegrasikan agenda antikorupsi untuk memperkuat partisipasi rakyat yang terorganisir dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik.

Memberdayakan aktor-aktor potensial untuk mewujudkan sistem politik, hukum, ekonomi dan birokrasi yang bersih dari korupsi dan berlandaskan keadilan sosial dan jender.

ICW - Bersama Rakyat Memberantas Korupsi

INDONESIA CORRUPTION WATCH

Divisi Kampanye Publik dan Penggalangan Dana

Sejak dibentuk pada Juni 2010, Divisi Kampanye Publik dan Penggalangan Dana telah berhasil menggalangan dukungan dana sebesar Rp 548 juta (saldo 10 Januari 2012) dari sekitar 1000 supporter. Donasi ini dipergunakan untuk kampanye membangun kesadaran antikorupsi ke berbagai kalangan, baik di Jakarta maupun wilayah lainnya. Di antaranya, pendidikan antikorupsi di sekolah-sekolah setingkat SMA dan di sejumlah kampus. Juga, menyelenggarakan kampanye antikorupsi kepada anak-anak melalui kegiatan lomba mewarnai dan aneka permainan bertema antikorupsi.

ICW - Bersama Rakyat Memberantas Korupsi

CAPAIAN DONASI ICW

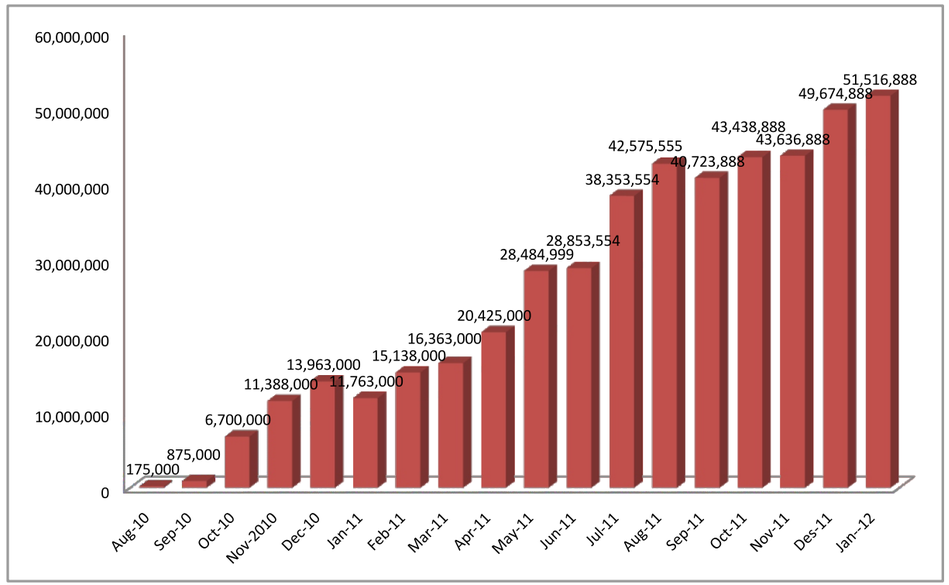

Selain penerimaan donasi melalui sistem autodebet, selama kurun waktu Februari 2010-Desember 2011, ICW menerima donasi via transfer rekening bank sebesar Rp 84.028.600.

FOTO: dok. ICW

ICW - Bersama Rakyat Memberantas Korupsi

FOTO: dok. ICW

Sepanjang Desember 2011, sebagian donasi telah digunakan guna mendukung pelaksanaan program APBS (Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) partisipatif untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di 28 sekolah dasar di Kabupaten Garut.

Program ini bertujuan untuk mengorganisir orangtua siswa, masyarakat, komite sekolah, guru, untuk bersama-sama menyusun dan merencanakan anggaran sekolah secara terbuka, partisipatif dan berperspektif jender.

Penggalangan dana supporter ICW dilakukan di mal dan tempat-tempat publik di Jakarta, Tangerang, Bekasi dan Depok. Pengumpulan donasi dilakukan melalui sistem autodebet rekening bank, bekerjasama dengan BCA, BNI, Kartu Kredit (Visa dan Master) serta Bank Mandiri, atau melalui transfer ke rekening ICW:

a.n. **Perkumpulan Indonesia Corruption Watch**
CIMB Niaga, nomor rekening 9080101344003
Bank Mandiri, nomor rekening 1260005669600
a.n. **Perkumpulan ICW**
BNI 46, nomor rekening 0064360742
Bank BRI, nomor rekening 042601000115308
a.n. **Indonesia Corruption Watch**
BCA, nomor rekening 8780161737

Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran

Fokus utama Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran (MAA) adalah perubahan kebijakan di bidang industri ekstraktif untuk lebih transparan dan akuntabel. Upaya riset dan advokasi dilakukan untuk mendorong perbaikan terkait aspek pengawasan dan optimalisasi penerimaan negara dari sektor ekstraktif.

Bersama koalisi, ICW telah berhasil mendorong perubahan kebijakan terkait dengan UU No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba). Terjadi perubahan kebijakan, dari rezim kontrak karya menjadi rezim perizinan.

ICW - Bersama Rakyat Memberantas Korupsi

Foto: JATAM

Advokasi di bidang pengawasan industri ekstraktif juga berhasil mengegolkan perubahan kebijakan terkait *cost recovery* PPH migas. Yang telah diperbaiki diantaranya, PP No 79 Tahun 2010 tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi. PP No 09 Tahun 2012 tentang jenis dan tarif atas penerimaan bukan pajak yang berlaku pada Kementerian ESDM menggantikan PP 45/2003 tentang PNBP di ESDM, dan Keppres No 3 Tahun 2011 tentang tim evaluasi untuk penyesuaian kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara. Juga, mulai berlakunya Perpres 26/2010 tentang *extractive industry tranparancy initiative*, dimana ada tahun ini akan dilakukan pelaporan tahap pertama.

Upaya pengawasan juga dilakukan melalui *legal drafting*. Bersama koalisi, ICW mengusulkan draft versi NGO tentang revisi UU migas. Saat ini draft sudah mulai dibahas di DPR.

ICW - Bersama Rakyat Memberantas Korupsi

Riset ICW di sektor Industri Ekstraktif

No	Investigasi Kasus	Periode	Kerugian negara
1.	Kekurangan pembayaran royalti PT Newmont Nusa Tenggara	2004-2010	Rp 2,136 triliun
2.	Kekurangan pembayaran royalti PT Freeport Indonesia	2002-2010	Rp 1,591 triliun
3.	Tunggakan pajak penghasilan migas dari 33 perusahaan	Hingga 2010	Rp 5,247 triliun
4.	Penyerobotan kawasan hutan untuk kepentingan bisnis kelapa sawit di daerah Sambang, Ketapang dan Bengkayan, Kalimantan Barat.	Perolehan izin lokasi dan izin usaha perkebunan pada rentang waktu 2003-2010.	Rp 1,15 triliun
5.	Penyalahgunaan izin lokasi kawasan hutan di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah	Perolehan izin lokasi pada rentang waktu 2004-2005.	Rp 7,99 triliun

Divisi Korupsi Politik

Reformasi pendanaan partai politik menjadi isu utama fokus program kerja Divisi Korupsi Politik pada 2011. Divisi ini menyusun kajian pendanaan partai politik dalam kasus-kasus korupsi kontemporer, seperti dugaan *mark-up* dalam rencana pembangunan gedung baru DPR RI, korupsi Wisma Atlet dan suap Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID).

Bersama jaringan dan koalisi, ICW melakukan advokasi legal drafting dalam RUU Pemilu. Dalam advokasi bidang pendanaan partai politik, sejumlah parpol, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Kementerian Dalam Negeri merespons pentingnya transparansi pendanaan parpol.

Divisi Korupsi Politik juga melakukan riset evaluasi Pemilukada di Kota Jayapura dan Kabupaten Pandeglang, serta pemantauan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Kampar dan Provinsi Banten. Hasilnya, telah disusun *tools* pemantauan Pemilukada, peta korupsi Pemilukada, serta gambaran pola pendanaan Pemilukada. Proses monitoring juga menghasilkan sejumlah temuan praktik korupsi dalam Pemilukada yang kemudian telah dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

ICW - Bersama Rakyat Memberantas Korupsi

FOTO: Arif Slam

Kasus Dugaan Korupsi yang dilaporkan selama 2012

1. Laporan kasus dugaan korupsi dana hibah-bansos provinsi Banten. Hasil dari Advokasi analisa dan laporan dana hibah dan bansos yaitu rekomendasi untuk memasukkan aturan moratorium dana hibah dan bansos menjelang Pemilukada, selain aturan yang sudah ada yakni Permendagri No. 32 Tahun 2011.

2. Laporan dugaan mafia anggaran DPPID di badan anggaran DPR RI. Hasil laporan mafia anggaran DPPID di Banggar, KPK telah menetapkan seorang tersangka.

3. Laporan dugaan *mark-up* pembangunan gedung baru DPR. Hasilnya, pembangunan gedung baru dibatalkan. Sekjen dan BURT diperiksa perihal *mark-up* dalam perencanaan pembangunan gedung.

ICW meminta laporan keuangan dari sembilan partai politik terbesar di Indonesia. Karena respons awal kurang baik, ICW kemudian mengajukan sengketa informasi kepada Komisi Informasi Pusat (KIP).

Respon Parpol Terhadap Uji Akses Informasi Laporan Keuangan

Peringkat Respon	Partai Politik	Tahap Uji Akses	Peringkat Kualitas	Partai	Kualitas Laporan
1	PKB	Tahap Keberatan	1	PKB	Baik
2	PKS	Tahap Keberatan	2	PPP	Cukup
3	PPP	Tahap Keberatan	3	PPP	Cukup
4	Gerindra	Mediasi Pertama	4	Gerindra	Cukup
5	GOLKAR	Mediasi Pertama	5	GOLKAR	Cukup
6	PAN	Mediasi Pertama	6	PAN	Buruk
7	Demokrat	Mediasi Kedua	7	Demokrat	Buruk
8	PDIP	Mediasi Kedua	8	PDIP	Buruk
9	HANURA	Belum Menyerahkan	9	HANURA	Buruk

ICW - Bersama Rakyat Memberantas Korupsi

FOTO: Arif Slam

Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan

Corruptors fight back mengancam gerakan antikorupsi. Dalam melawan agenda penggembosan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan bersama koalisi dan jaringan antikorupsi lainnya terlibat aktif mengawal proses regulasi strategis, yakni RUU KPK dan RUU Tipikor.

Selain itu, divisi HMP juga melakukan pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum secara berkala, khususnya berkaitan dengan putusan hakim terhadap kasus korupsi serta pengawalan penanganan kasus korupsi strategis yang tengah dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Untuk melakukan kerja monitoring penegak hukum dan penegakan hukum, ICW berupaya mengembangkan instrumen pengawasan bagi masyarakat sipil. Salah satu metode baru yang digunakan adalah eksaminasi publik dan upaya hukum publik menggunakan pendekatan dan analisis hukum baru.

Eksaminasi publik yang dilakukan ICW terhadap 20 kasus korupsi yang ditangani Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maupun Pengadilan Negeri, telah memberikan efek revisi vonis oleh Mahkamah Agung di tingkat kasasi. Sejumlah terdakwa korupsi yang awalnya divonis bebas atau divonis rendah, di tingkat kasasi kemudian mendapat hukuman lebih berat, bahkan hingga 15 tahun penjara.

Selain eksaminasi publik, ICW bersama jaringan PILNET telah melakukan serangkaian gugatan Judicial Review (JR) terhadap UU KPK tentang ketentuan Masa Jabatan Pimpinan KPK, JR UU Pemerintahan Daerah tentang ketentuan Izin Pemeriksaan Kepala Daerah oleh Presiden, JR UU Sistem Pendidikan Nasional tentang ketentuan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional.

Daftar Eksaminasi Publik yang Dilakukan ICW

No.	Terdakwa	Kasus	Penyidikan	Pengadilan
1	Dudhie Makmun Murod	Suap pemilihan Deputi Senior Gubernur BI, Miranda S. Gultom	KPK	Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat
2	T. Azmun Jafar	Penerbitan IUPHHK-HT/IPK th. 2001 s/d 2006 Kab. Pelalawan	KPK	Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat
3	Anggodo Widjoyo	Percobaan penyuapan pada Pimpinan KPK dan upaya menghalang-halangi penegakan hukum	KPK	Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat
4	Mochtar Muhammad	Penyalahgunaan APBD Bekasi, Suap pengesahan APBD 2010, Suap terhadap BPK Jabar, dan Suap Adipura	KPK	Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat
5	Syahrial Oesman	Suap terkait Alih Fungsi Hutan Lindung Pantai Air Telang oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.	KPK	Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat
6	Ahmad Sujudi	Penyalahgunaan pengadaan alat kesehatan untuk rumah sakit Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Palang Merah Indonesia (PMI) oleh Ditjen Pelayanan Medik Depkes RI TA. 2003	KPK	Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat
7	Rosalina Manulang	Suap pembangunan Wisma Atlet, Jakabaring Palembang	KPK	Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat
8	Bachtiar Chamsjah	Pengadan sarung, mesin jahit dan sapi fiktif di Departemen Sosial	KPK	Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat
9	Agusrin Najamuddin	Dana bagi hasil PBB dan BPHTB di Provinsi Bengkulu	KPK	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
10	Rusdiharjo	Dana PNBP Terkait Pungutan Tarif Jasa Pengurusan Dokumen Keimigrasian di KBRI Kuala Lumpur Malaysia th. 2003 s/d 2005	KPK	Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat
11	**Satono**, Bupati Lampung Timur	Menyimpan dana kas daerah APBD di BPR Tripanca. Estimasi kerugian Negara Rp. 119 Miliar.	KPK	Pengadilan Negeri Tanjungkarang
12	**Umar**, Kadinas PU Agam, Wakil Bupati Agam	Pengerjaan dan pemeliharaan jalan di Dinas PU, Agam Tahun 2008.	KPK	Pengadilan Tipikor Sumatera Barat pada PN Kota Padang
13	**Soetedjo Yuwono**, Mantan Sekretaris Menkokesra JAKARTA	Penunjukan langsung pengadaan alat kesehatan penanggulangan wabah flu burung pada 2006 senilai Rp. 98,6 Miliar.	KPK	Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada PN Jakarta Pusat
14	**Soemino Eko Saputro**, Mantan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan JAKARTA	penunjukan langsung kepada Sumitomo Corporation dalam pengangkutan 60 unit kereta rel listrik (KRL) hibah dari Jepang tahun 2006-2007	KPK	Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada PN Jakarta Pusat
15	**Putranefo Alexander P.**, Presiden Direktur PT. Masaro Radiokom JAKARTA	Revitalisasi jaringan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Departemen Kehutanan 2006-2007. Kerugian Negara Rp. 89,3 Miliar.	KPK	Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada PN Jakarta Pusat
16	**Jimmy Rimba Rogi**, Walikota Manado	Penyalahgunaan APBD Menado senilai Rp. 70,3 Miliar, terkait dengan dana APBD untuk PSSI	KPK	Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada PN Jakarta Pusat
17	**Syamsul Arifin**, Mantan Bupati Langkat/Gubernur Sumatera Utara MEDAN	Penyalahgunaan APBD Kab Langkat Rp. 98,7 Miliar Tahun 2000-2007.	KPK	Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada PN Jakarta Pusat
18	**Salehuddin**, Ketua DPRD Kab. Kutai Kertanegara	Penyalahgunaan (pembayaran ganda) anggaran operasional DPRD Rp. 2,89 Miliar untuk 40 anggota DPRD 2004-2009.	Kejaksaan Negeri	Pengadilan Tipikor Kalimantan Timur pada PN Samarinda
19	**I Gede Winasa** Mantan Bupati Jembrana,Bali	Pengadaan mesin pengolah sampah organik menjadi kompos	Polda Negara	Pengadilan Negeri Negara
20	**Azhar Latief** Padang	Penggunaan dana Representatif PDAM Kota Padang	Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat	Pengadilan Tipikor Sumatera Barat pada PN Kota Padang

1. **Agusrin Najamuddin**, Gubernur Bengkulu (*non-aktif*).
   - Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 2113/Pid.B/2010/PN.JKT.PST, ia dijatuhi vonis Bebas.
   - Pada tanggal 10 Januari 2012, Mahkamah Agung mengumumkan penjatuhkan vonis bersalah pada Agusrin Najamuddin karena melakukan korupsi dan dihukum 4 tahun penjara.

2. **Muchtar Muhammad**, Walikota Bekasi (*non-aktif*).
   - Berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Bandung Nomor: No: 22/Pid.Sus/TPK/2011/PN.BDG tanggal 11 Oktober 2011, ia dijatuhi vonis Bebas.
   - Pada tanggal 7 Maret 2012 Mahkamah Agung mengumumkan penjatuhan vonis bersalah pada Muchtar Muhammad dengan hukuman 6 tahun penjara.

3. **Satono**, Bupati Lampung Timur (*non-aktif*)
   - Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 304/Pid.Sus/2011/PN.TK, tanggal 13 Oktober 2011
   - Pada tanggal 19 Maret 2012, Mahkamah Agung menjatuhkan vonis 15 tahun untuk Satono, 3 tahun lebih tinggi dari tuntutan Jaksa.

Divisi Investigasi dan Publikasi

Sepanjang 2011, Divisi Investigasi dan Publikasi melaporkan 4 kasus dugaan korupsi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Divisi ini juga menerima 894 laporan masyarakat yang mengadukan dugaan kasus korupsi.

Kasus yang dilaporkan yakni kasus suap di Kejari Buol Sulawesi Tengah dan Kejati Jawa Tengah serta dugaan kasus korupsi di Pemda Merauke terkait investasi kapal angkut dan dugaan korupsi *driving simulator* di Dirlantas Mabes Polri.

Selain investigasi kasus, Divisi ini juga terlibat dalam *tracking* latar belakang calon pimpinan KPK jilid III. Bersama koalisi masyarakat sipil, ICW memberikan hasil tracking calon pimpinan KPK untuk menjadi salah satu bahan penilaian Panitia Seleksi. Hasilnya, sejumlah calon bermasalah berhasil dieliminasi.

Advokasi di bidang keterbukaan informasi publik juga menjadi salah satu fokus program kegiatan selama 2011. ICW terlibat aktif mengawal terbentuknya Komisi Informasi Daerah (KID) di Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Sulawesi Selatan, Bali. Di Sumatera Utara, proses pembentukan KID sudah sampai proses *fit and proper test*.

Secara bersamaan, ICW memanfaatkan mekanisme permintaan informasi ke sejumlah badan publik sebagaimana diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), disamping mendorong kelompok masyarakat sipil untuk berinisiatif mengajukan permintaan informasi. Kasus sengketa informasi yang dimenangkan ICW diantaranya sengketa informasi terkait rekening gendut perwira tinggi Polri dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) di 5 sekolah di Jakarta.

ICW - Bersama Rakyat Memberantas Korupsi

FOTO: dok. ICW

Perkembangan Penanganan Kasus yang Dilaporkan ICW

- Vonis terhadap mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah dkk atas kasus korupsi pengadaan mesin di Departemen Sosial pada tahun 2006.
- Vonis terhadap Eddie Widiono Suwondho, mantan Direktur Utama PT PLN, atas kasus korupsi CIS-RISI di PLN Distribusi Jakarta Raya, Tangerang
- Vonis terhadap Gubernur Bengkulu (non-aktif) Agusrin M Najamudin, atas kasus korupsi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- Vonis terhadap Ade Sudirman (mantan Kepala Sub Bagian Verifikasi Keuangan Kementerian Luar Negeri) dan Syarif Syam Arman (mantan Kepala Bagian Pelaksana Anggaran Kemenlu), dalam kasus korupsi tiket kementerian Luar Negeri
- Penerbitan SP3 terhadap kasus korupsi dalam renovasi KBRI Thailand oleh Duta Besar Indonesia untuk Thailand, Mohammad Hatta.
- Penahanan terhadap Bupati Siak Arwin AS dan Bupati Kampar Burhanudin Husin dalam kasus korupsi kehutanan (IUPHHKT) Riau.
- Pencopotan Kejari Buol dan Aspidsus dalam kasus suap saat menangani kasus dugaan korupsi Proyek Pengadaan Alat Geologi Tahun Anggaran 2009

Divisi Monitoring Pelayanan Publik

Keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari berapa banyak koruptor yang berhasil dipenjara dan berapa banyak uang negara yang diselamatkan. Akan tetapi, pemberantasan korupsi dinyatakan berhasil jika ada peningkatan mutu pelayanan publik yang berdampak pada kesejahteraan rakyat.

Pencapaian penting yang diraih Divisi Monitoring dan Pelayanan Publik ICW selama tahun 2011 adalah perubahan mekanisme penyaluran dana Bantuan Operasional (BOS). Melalui serangkaian proses advokasi bersama jaringan dan koalisi pendidikan, Divisi MPP- ICW berhasil mendorong perubahan kebijakan penyaluran dana BOS agar langsung masuk ke rekening sekolah, tanpa harus mengendap lama di rekening pemerintah kabupaten/kota.

Masih terkait isu pendidikan, advokasi yang dianggap penting adalah program APBS Partisipatif. Sejumlah 58 sekolah telah didampingi oleh Divisi MPP- ICW untuk melaksanakan perencanaan, penganggaraan dan pengelolaan keuangan sekolah secara partisipatif dan responsif gender dengan melibatkan orangtua siswa, masyarakat, komite sekolah dan guru. Sekolah dampingan ICW tersebar di Garut (28), Serang(2), Waykanan(4), Tasikmalaya (4), Muna (10), Buton (10).

Divisi MPP-ICW bersama koalisi pendidikan mengajukan Judicial Review pasal 5 ayat 3 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang mengatur tentang pendirian Rintisan Sekolah Berstatus Internasional (RSBI) dan Sekolah Berstandar Internasional (SBI). Sekolah RSBI/SBI dinilai bertentangan dengan Pasal 31 UUD 1945 tentang hak seluruh warga negara untuk mendapatkan pendidikan layak. Proses JR masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi.

Divisi ini juga memperkuat jaringan organisasi guru dan orangtua murid, dengan memfasilitasi deklarasi dan kongres Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) serta terbentuknya Aliansi Orangtua Peduli Pendidikan Indonesia (APPI). Organisasi tersebut didorong untuk aktif memantau korupsi di sektor pendidikan, serta mengawal perbaikan kebijakan.

Di sektor kesehatan, Divisi MPP- ICW banyak terlibat dalam penguatan Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) dan Sistem Jaminan Sosial (SJSN) hingga kemudian keduanya disahkan oleh DPR RI.

Sekolah Dampingan wilayah Garut 2011-2012

NO	Nama Sekolah	Lokasi	
		Kecamatan	Desa
1	SDN Sukajaya 3	Malangbong	*Sukajaya*
2	SDN Sanding 2	Malangbong	*Sanding*
3	SDN Karangmulya 1	Malangbong	*Karangmulya*
4	SDN Cinagara 4	Malangbong	*Cinagara*
5	SDN Sanding 4	Malangbong	*Sanding*
6	SMPN 4 Malangbong	Malangbong	*Cibunar*
7	SDN Padasuka 4	Cibatu	*Padasuka*
8	SDN Wanakerta 1	Cibatu	*Wanakerta*
9	SDN Balewangi 2	Cisurupan	*Balewangi*
10	SDN Wanaraja 2	Wanaraja	*Wanaraja*
11	SDN Sindangmekar 2	Wanaraja	*Sindangmekar*
12	SDN Sukahurip 1	Pangatikan	*Sukahurip*
13	SDN Godog 3	Karangpawitan	*Godog*
14	SDN Cinta 1	Karang tengah	*Cinta*
15	SDN Simpen kaler 3	Limbangan	*Simpen*
16	SMAN 13 Garut	Limbangan	*Limbangan*
17	SDN Pasirkiamis 1	Pasirwangi	*Pasirkiamis*
18	SDN Sukarame 2	Bayongbong	*Sukarame*
19	SDN Cintanagara 1	Cigedug	*Cintanagara*
20	SMPN 3 Cisompet	Cisompet	*Cisompet*
21	SDN Neglasari 5	Cisompet	*Neglasari*
22	SDN Sindangsari 2	Cisompet	*Sindangsari*
23	SDN Cihaurkuning 3	Cisompet	*Cihaurkuning*
24	SDN Rancasalak 1	Kadungora	*Rancasalak*
25	SDN Cibunar 2	Tarogong kidul	*Cibunar*
26	SDN Haurpanggung 2	Tarogong kidul	*Haurpanggung*
27	SDN Sukakarya 2	Banyuresmi	*Sukakarya*
28	SDN Tegalgede 2	Pakenjeng	Tegal gede

Membangun Mimpi Sekolah Bebas Korupsi

Intan melongok keluar ketika kamera membidik ke arahnya. Bukan lewat jendela. Kepala mungilnya menerobos dinding kelas yang bolong melompong.

Bangunan sekolah yang dihuni Intan bersama 136 siswa SDN Haurkuning 03, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, tidak layak pakai. Dindingnya jebol, atap tanpa eternit, lantai mengelupas, anyaman bambu pembatas ruangan compang-camping, tiang penyangga keropos. Debu beterbangan di dalam kelas.

Kondisi ruang kelas 1, 2 dan 3, di deret bangunan belakang, memprihatinkan. Dimakan usia dan minim perawatan, bangunan yang didirikan pada 1982 itu tampak ringkih. Pun, ruangan yang itu masih harus dipakai bergantian, dibagi pershift antara siswa kelas 1 dan 2. Ruang kelas di ujung bangunan yang sedianya untuk kelas 1, sama sekali tidak dapat digunakan.

Tiga unit ruang kelas plus satu ruang kecil untuk kantor guru berada di bangunan terpisah. Kondisinya tak jauh berbeda; rusak dan kotor. Jendela pecah, eternit rubuh, dinding kumuh, buku-buku pelajaran dan perangkat praktik bertumpuk di pojok kelas. Ada meja bola pingpong di belakang tempat duduk siswa. "Tidak ada lagi ruangan tersisa," kata Sumpena, guru SDN Haurkuning, Sabtu (17/3/2012).

Bangunan di deret depan itu baru berdiri pada 2008. Sayang, unit yang dibangun dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) itu tak terawat baik pascagempa yang mengguncang Garut dan Tasikmalaya pada 2010. Retakan di dinding belum diperbaiki, jendela yang hancur tak kunjung diganti.

Padahal, setiap tahun, sekolah menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat sekitar Rp 80 juta. APBN 2011 juga mengalirkan Rp 33.048.000 lewat program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT AS). Ditambah lagi, Bantuan untuk Siswa Miskin (BSM) senilai Rp 360 ribu persiswa pertahun.

Kemana perginya dana ratusan juta itu? Tidak pernah ada yang tahu, selain kepala sekolah.

FOTO: dok. ICW

Anggota komite sekolah SDN Haurkuning 03, Suherman, mengatakan, Kepala Sekolah sangat tertutup dalam pengelolaan anggaran sekolah. Komite sekolah tidak dilibatkan dalam penyusunan Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Sekolah (RAPBS). "Bahkan saya tidak tahu berapa jumlah dana BOS yang diterima sekolah. Saya tanya ke kepala sekolah tidak dijawab," kata Suherman.

Penyusunan RAPBS idealnya dilakukan bersama-sama antara kepala sekolah, guru, komite sekolah, dengan melibatkan orangtua siswa dan masyarakat sekitar. Disusun secara partisipatif, pengelolaan anggaran lebih transparan dan bermanfaat maksimal. Semua pihak terlibat dalam mengatur dana yang masuk, disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Ketika dana tidak cukup, bagaimana kemudian mereka mencari alternatif solusinya. Sekolah, pada akhirnya, dimiliki dan dirawat bersama-sama.

Indonesia Corruption Watch (ICW) bekerjasama dengan Garut Goverment Watch (GGW), dengan didanai donasi supporter ICW, menggelar pelatihan penyusunan APBS Partisipatif di 28 sekolah di Kabupaten Garut. Pelatihan dilakukan lima kali di setiap sekolah, mulai sosialisasi, berlatih membaca dan menyusun anggaran, hingga rencana aksi. "Pada akhirnya masyarakat yang harus bergerak sendiri untuk melakukan perubahan. Kami hanya memfasilitasi dan mengaktivasi gerakan," ujar sekjen GGW Agus Rustandi.

APBS Partisipatif, mengajak masyarakat peduli dengan kondisi sekolah, sekaligus mendorong transparansi anggaran. Transparansi mencegah peluang terjadinya korupsi.

AUDIT KEUANGAN ICW

AKTIVA	
Aktiva Lancar	
Kas dan setara kas	5.336.334.475
Piutang karyawan	311.507.841
Piutang lain-lain	9.712.000
Uang muka & beban dibayar di muka	917.178.502
Piutang program	477.376.333
Jumlah aktiva lancar	**7.052.119.151**
Aktiva tetap	657.812.725
Harga perolehan	(524.789.898)
Akumulasi penyusutan	133.022.827
TOTAL AKTIVA	**7.185.141.978**

KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH	
Kewajiban	
Kewajiban lancar	479.788.099
Total kewajiban	**479.788.099**
Aktiva bersih	
Tidak terikat	3.131.551.536
Terikat kontemporer	3.573.902.343
Total aktiva bersih	**6.705.353.879**
TOTAL KEWAJIBAN DAN AKTIVA	**7.185.141.978**

PENERIMAAN	
Dana dari grantor	6.264.130.440
Dana tidak terikat	2.704.612.908
Total penerimaan	**8.968.743.348**
PENGELUARAN	
Program	6.673.551.739
Dana tidak terikat	2.378.846.393
Total pengeluaran	**9.052.398.132**
Kenaikan/(penurunan) Aktiva Bersih	**(83.654.784)**

No	Program	Donor	Nilai
1.	Promoting Reduction Deforestation Rate and Combating Corruption in Land Use Change Through	Kemitraan	401.625.000
2.	Endorsing Integrity on Campaign Finance Report in Local Election Program	MSI	844.654.200
3.	Scoping Paper to Apply the Anti Corruption Approach in Combating Deforestation in Indonesia	DFID	355.250.000
4.	Search Budget for Best Practice Model of Bureaucratic Reform Research	UNODC-TI	180.950.000
5.	Strengthening Coordination and Supervision in KPK	UNODC	172.499.500
6.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Seleksi Pimpinan KPK	TAF	148.457.500
7.	Increasing Transparency and Accountability in the Management of Natural Resources by Providing Knowledge and Technical Expertise to Local Civil Society Groups and Governments on Extractive Revenue Flows	RWI-MIGAS	341.463.360
8.	Endorsing People Monitoring on Local Politics and Business Relation	TIFA	355.790.854
9.	Establishing Transparency and Accountability of Local Information Commission in Five Provinces and Empower The Poor to Conduct Social Audit on the Delivery of Public Services in Six Districts/Cities	Ford Foundation	1.342.365.750
10.	Promoting Corruption Eradication to Reduce Illegal Palm Oil Expansion	DOEN	245.800.000
11.	Penguatan Kapasitas pada Bidang Penganggaran dan Advokasi untuk Pelayanan Publik Pelatihan CRC di Muna, Buton, Sumba Timur	ACCESS	585.965.000
12.	a. Improving Civil Society Participation in Education Budgeting at Local Government and School Level b. Fundraising	HIVOS	836.850.000
13.	Promoting Good Governance in Exploitation of Natural Resources	11.11.11	452.459.276
TOTAL			**6.264.130.440**

(Data diatas merupakan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Aktivitas Yayasan Indonesia Corruption Watch (ICW) hingga 31 Desember 2011 berdasarkan hasil Laporan Audit Independen. Lebih lengkap dapat dilihat di www.antikorupsi.org)

FOTO: dok. ICW

Sumber Daya Manusia ICW

Perkumpulan ICW

Dewan etik
Dadang Trisasongko, Teten Masduki, Kamala Chandrakirana

Anggota
Luki Djuniardi Djani, Bivitri susanti, Ani Soetjipto, Lodewijk F Paat, Yanuar Rizky

Badan Pekerja

Koordinator
Danang Widoyoko

Wakil Koordinator
Adnan Topan Husodo, Sely Martini

Divisi Korupsi Politik
Ade Irawan, Abdullah Dahlan, Apung Widadi

Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran
Firdaus Ilyas, Mouna Wasef

Divisi Monitoring Pelayanan Publik
Febri Hendri, Siti Juliantari

Divisi Investigasi dan Publikasi
Agus Sunaryanto, Tama Satrya Langkun, Laits Abid

Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan
Febri Diansyah, Donal Fariz, Emerson Yuntho

Divisi Kampanye Publik dan Penggalangan Dana
Illian Deta Artasari, Farodlilah Muqoddam, Azrul Akmal, Fathroni Diansyah, Muhammad Gaffar, Jane Sandra Melissa, Safranis Rismaya

Keuangan dan Kesekretariatan
Supriyatna, Siti Nurjannah, Dunita, Supitriyani, Nurhayati, Maya Fatmawati, Dede, Eko Pamudji Widodo, Suhanda

PENGHARGAAN ICW

Peneliti Divisi Investigasi dan Publikasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama Satrya Langkun, Selasa (17/5/2011), dinobatkan sebagai *Young Newsmaker of The Year* oleh Seputar Indonesia Award 2011.

Tama dinilai menginspirasi anak muda untuk turut terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi.

ICW menerima penghargaan UII Award.

ICW dinilai sebagai lembaga yang konsisten dalam upaya pemberantasan korupsi. Rektor UII, Edy Suandi Hamid mengatakan, ICW merupakan lembaga pertama yang akan mendapat gelar ini. "Di saat amburadulnya legislatif, yudikatif, dan eksekutif dalam memberantas korupsi, ICW hadir sebagai pilar keempat dalam penuntasan korupsi," ujar Edy dalam jumpa pers "Pemberian UII Award," Senin (27/6/2011).

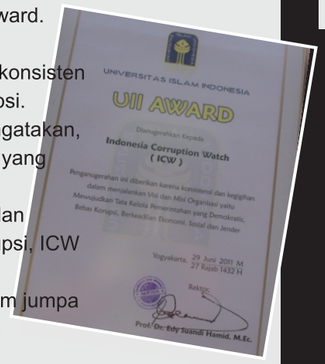

ICW menerima penghargaan Soegeng Sarjadi Award on Good Governance 2011 kategori Lembaga Masyarakat Sipil.

Soegeng Sarjadi Award on Good Governance merupakan bentuk apresiasi kepada pemimpin publik atas prestasi dalam penerapan model kepemimpinan dan ketatalaksanaan negara yang ideal untuk masyarakat Indonesia. Penghargaan ini diberikan kepada pemimpin publik di tiga arena yakni state, society dan market.

Tahun 2011, ICW menempati peringkat 27 dunia untuk kategori Transparency and Good Governance Think Tanks menurut survey “The Think Tanks and Civil Societies Program” dari University of Pennsylvania, Philadelphia, USA. http://www.gotothinktank.com/

Survei ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan lembaga think tanks terkemuka di dunia yang bergerak di bidang kebijakan publik . Selama enam tahun, ***"Think Tank Indeks"*** telah menjadi sumber otoritatif bagi lembaga kebijakan publik di seluruh dunia.

ICW dinobatkan sebagai salah satu dari “11 Tokoh Pejuang Antikorupsi 2011” versi Majalah Tempo.

ICW menerima penghargaan Hari Pers Nasional Award (HPN Award) 2011 dari Dewan Pers.

ICW dianugerahi HPN Award, sebagai institusi yang dapat secara sinergis berkawan dengan media dalam upaya pemberantasan korupsi. "Karena ICW selalu melibatkan pers dalam kampanye dan upaya pemberantasan korupsi," ujar Priyombodo, salah satu anggota Komunitas HPN saat ditemui di sela perayaan HPN di aula TVRI, Jakarta, Rabu (19/4/2011).